

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Indonesia konflik politik sudah merupakan kejadian yang sangat sering terjadi. Konflik tidak hanya terjadi dalam lingkup kecil seperti keluarga sebagai pribadi, melainkan sudah merembak pada tingkatan nasional. *Letjen (Pur) Kiki Syanakri di Harian Umum Suara Pembaharuan* menggambarkan bahwa sumber konflik di Indonesia setidaknya terdiri dari lima faktor, yaitu: ideologi atau agama, politik, ekonomi, antar-ethnis, dan separatisme (Syanakri, 2004). Dari inventarisasi Panitia Pengawas Pemilu, setidaknya terdapat tujuh daerah yang rawan konflik di Indonesia. Di antaranya adalah kawasan Pantura, daerah “tapal kuda” di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kalimantan, Jawa Timur dan Jakarta (Amin, 2004). Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur sebagai daerah yang rawan terjadinya konflik pemilu legislatif, baik itu konflik eksternal dan gesekan antar caleg dalam internal parpol (IGN Sawabi, 2009)

Kota Malang sejak masa kolonial Belanda merupakan tempat peristirahatan dan tempat tujuan wisata bagi para pendatang atau wisatawan, iklim kota ini yang sejuk dan kaya akan pemandangan indah serta didukung oleh lingkungan yang alami berupa perkebunan, pegunungan, sungai dan taman menjadikan Malang dikenal sebagai *Paris Van East Java* dan *Switzerland of Indonesia*. (Wisata, 2009)

Masyarakat Malang dikenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari beragam etnik (suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Sebagian besar penduduk kota Malang memeluk agama Islam, diikuti Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindhu dan Budha. Kehidupan umat beragama yang terjadi di kota Malang dapat dikatakan rukun dan keduanya dapat saling bekerja sama satu sama lain dalam upaya membangun kota yang lebih baik dari sebelumnya. Beraneka ragamnya kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki kota Malang berpengaruh juga terhadap kesenian tradisional yang ada (Inokofu, 2008).

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya adalah Tari Topeng, gaya kesenian Tari Topeng merupakan wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Penduduk kota Malang kebanyakan merupakan pendatang, yaitu berupa pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa. Golongan pedagang dan pekerja sebagian besar berasal dari daerah di sekitar kota Malang, sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa berasal dari luar daerah (wilayah Indonesia bagian timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Karakteristik penduduk di Malang Raya bisa dibilang Heterogen dan memiliki hubungan kekerabatan yang baik. Namun beberapa waktu yang lalu sempat ada semacam potensi konflik yang bersifat etnis, karena pada wilayah pasar di Kota

Malang yang menguasai daerah tersebut adalah etnis Madura. Sehingga saat maraknya kerusuhan yang terjadi di Sampit sempat muncul ide di kalangan etnis Madura bahwa Malang akan menjadi *Sampit kedua* karena salah satu sumber kecemburuan sosial ataupun sentimen etnis masyarakat Malang adalah terhadap etnis Madura. Menurut seorang informan, orang Madura “sulit diatur”, pengertian sulit diatur mengacu pada upaya pemerintah yang berupaya menertibkan pasar di kota Malang. Para pedagang yang mayoritas berasal dari etnis Madura menolak untuk ditertibkan. Kerusuhan yang terjadi antar etnis dapat dikatakan tidak terjadi karena kerusuhan tersebut hanya bersifat ketegangan antar etnis saja, tidak sampai berlanjut pada konflik yang bersifat fisik. Peristiwa yang menunjukkan kebencian masyarakat Malang terhadap etnis lain yang telah terangkat kepermukaan disebabkan kemunculan konflik sejenis yang muncul di daerah lain. Hal itulah yang memancing kebencian bersifat laten muncul. Potensi kecil konflik selain etnis adalah motif agama. Potensi konflik dalam hal agama dapat dilihat saat diadakan perayaan natal di Kota Malang, sejumlah gereja dijaga ketat. Pada saat itu pusat Alkitab di Malang di bom oleh sejumlah oknum. Motif dari pengeboman ini disebabkan oleh keyakinan yang berbeda, bagi beberapa umat/oknum penyebaran ajaran agama terlalu dipaksakan, meskipun cara yang dilakukan dengan halus yaitu memberikan bantuan berupa sembako terhadap masyarakat miskin yang berlainan agama. Meskipun potensi konflik dalam bidang keagamaan di Malang dapat dengan mudah memicu timbulnya konflik yang lebih besar namun dapat diimbangi dengan kerukunan agama dan toleransi yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sekolah katolik yang muridnya

tidak hanya murid katolik saja. Bagi siswa non Katolik alasan individu memilih sekolah tersebut adalah kualitas sekolah yang baik dan kedisiplinannya. (Amaah, 2010)

Dalam pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) tidak nampak adanya isu-isu yang bersifat etnis, baik itu dari calon kepala daerah atau para pemilih. Masyarakat memilih calonnya bukan berdasar atas daerah asal calon namun lebih kepada figur dari calon tersebut, apakah beliau pantas memimpin daerah Malang. (Mulyadi, 2006)

Meskipun selama ini Jawa Timur dipetakan sebagai daerah yang rawan atas konflik, Jawa Timur, yang dalam penelitian ini adalah Malang, tidak menunjukkan eskalasi konflik sampai pada tingkat tertinggi yaitu berupa tindakan anarkis massa yang berakibat pada lumpuhnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kasus konflik yang terjadi di Jawa Tengah dan Jakarta pada Tahun 1997/1998, kondisi di Malang relatif lebih kondusif dan hampir tidak terjadi adanya kegiatan pembakaran (Suryanto, dkk., 2009).

Pada penelitian ini modal sosial dipandang sebagai modal yang diduga mampu meredam dan mereduksi konflik politik yang ada pada masyarakat daerah Jawa Timur (Suryanto, dkk., 2009), sehingga dengan adanya modal sosial mampu memunculkan sebuah situasi yang kondusif, ketenangan pada warga masyarakat, dan tidak timbulnya sebuah potensi konflik yang nantinya dapat meresahkan masyarakat.

Fukuyama (1995) dalam bukunya yang berjudul “Trust” mendefinisikan bahwa modal sosial (*social capital*) adalah sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat. Dari definisi ini Fukuyama melihat bahwa aspek kerjasama (*cooperation*) merupakan unsur penting bagi seorang individu untuk berusaha bekerja sama dalam masyarakat.

Pada kesempatan lainnya, Putnam (1995) mendefinisikan juga bahwa modal sosial sebagai suatu fitur/figur dalam terjadinya suatu proses kehidupan sosial yang berlangsung di masyarakat. Fitur ini dapat berupa jejaring (*networks*), norma (*norms*), kepercayaan (*trust*) yang akhirnya mampu menggerakkan partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Di samping itu, Lin (2001) mencoba membedakan konsep antara modal sosial dengan jaringan sosial (*social networks*). Dalam definisinya tentang modal sosial, ia menjelaskan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dan digunakan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai suatu modal dalam penyelesaian konflik, modal sosial yang berupa kepercayaan (Fukuyama, 1995) jaringan sosial dan norma (Putnam, 1995) serta adanya sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial (Lin, 2001) akan dapat digunakan untuk penyelesaian konflik politik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Malang. Dipilihnya Malang sebagai wilayah penelitian dikarenakan wilayah ini termasuk daerah minim konflik politik

walaupun sebenarnya potensi untuk terjadinya suatu konflik horizontal sangat terbuka lebar.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, yaitu modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Malang, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pola konflik politik pada masyarakat Malang ?
- 2) Bagaimana penyelesaian konflik politik pada masyarakat Malang?
- 3) Modal sosial apakah yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik di kota Malang ?
- 4) Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan ke dalam masyarakat kota Malang ?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Sebenarnya ada banyak penelitian yang berkaitan erat dengan modal sosial (*social capital*) dalam upaya penyelesaian konflik, namun penelitian itu lebih banyak berfokus pada permasalahan sosial seperti, etnis, agama dan SARA. Diantara beberapa penelitian tersebut terdapat suatu penelitian yang dilakukan oleh Alqadrie, 1999 (Agus, 2007), yang meneliti sebuah konflik antar etnis di Sambas dan Ambon, dikaji secara sosiologis dimana akan dapat menghasilkan beberapa saran model penanganannya. Menurut Alqadrie penanganan konflik antar etnis di Ambon dan Sambas sebaiknya dilakukan dengan pemecahan yang

bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Solusi pemecahan konflik pada tragedi Ambon dalam jangka pendek ini sebaiknya dilakukan dengan cara melaksanakan dan melanjutkan pelaksanaan upacara adat Pela Gandong pada hari-hari besar nasional dengan memasukkan upacara tersebut dalam acara pokok dimana melibatkan pemeluk agama Islam dan Kristen secara adil dan seimbang. Pada solusi jarak menengah, model perekat sosial yang ditawarkan adalah: (1) Perlunya melakukan kawin silang antar etnis, dan (2) Perlunya mendirikan forum komunikasi antar kelompok etnis dan agama yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda dalam berbagai tingkat pemerintahan (Dati II, Kecamatan, Lingkungan, Kampung). Adapun penyelesaian konflik untuk jangka panjang, adalah dengan : (1) Perlunya peningkatan pembinaan umat agama masing-masing secara terus menerus agar tidak hanya memiliki hubungan vertikal (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horizontal (*hablum minannas*) yang tinggi. (2) Perlunya otonomi daerah atas Provinsi Maluku lebih ditingkatkan dan diperluas, (3) Pemerintah pusat hendaknya mengurangi kebijakan sentralistik dengan prinsip *Top-Down Policy*.

Pada kasus lain Alhumani, 1999 (Agus,2007) menawarkan beberapa hal model perekat sosial yang bersifat integratif di Tasikmalaya. Menurut Alhumani faktor integratif yang dapat meredam konflik adalah : (1) Doktrin agama Islam, dalam hal ini faham *ahlusunnah wal jamaah*. Doktrin ini memuat ajaran ukuwah islamiyah yang menjadi pegangan setiap kelompok sosial yang terlibat konflik. Kesadaran sebagai sesama pemeluk agama Islam menyebabkan mereka tetap saling menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan. (2) Kepemimpinan Kyai

yang menjadi figur sentral dalam masyarakat. Dengan kharisma dan kewibawaan seorang Kyai menjadikan setiap orang wajib menghormati atau bersikap tunduk dan patuh kepadanya. (3) Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dapat disebut faktor integratif yang dominan khususnya menyangkut konflik ideologi keagamaan. Tradisi masyarakat Sunda menempatkan hubungan kekerabatan pada posisi yang amat tinggi. (4) Kebudayaan lokal. Struktur kebudayaan Sunda Tasikmalaya dibangun atas sendi-sendi harmonisasi sosial yang lebih mengutamakan keselarasan, keseimbangan, toleransi dan tenggang rasa dalam proses interaksi antar warga masyarakat. Keempat faktor ini menjadi elemen perekat dan sekaligus mengatasi pertentangan-pertentangan sosial. Model perekat sosial dengan memanfaatkan kepercayaan satu sama lain dalam hubungan antar etnis akan berdampak positif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lokollo, J.E (Agus, 2007), mengenai “Kerusuhan di Maluku: Beberapa Masalah dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional”. Hasil penelitian tersebut membuahkan rekomendasi bentuk solusi alternatif, yakni perlunya : (1) Peningkatan hubungan-hubungan dialogis lintas SARA dengan menyelenggarakan forum dialog. (2) Redefinisi dan revitalisasi peran dan fungsi institusi adat. Diperlukan pula legitimasi formal bagi institusi adat. (3) Diperlukan kebijakan kriminal pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, adat dan kebudayaan. (4) Perlunya kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi. (5) Perlunya ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang

memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa berpihak pada kelompok manapun, dari segi etnis, agama, maupun ras. (6) Perlunya pembinaan dibidang kemasyarakatan terutama penanaman kesadaran, jiwa, semangat, dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dengan melibatkan kepolisian, TNI, komponen masyarakat, agama dan pemuda. (7) Diperlukan upaya sosialisasi kesadaran bela negara dalam keluarga, lingkungan desa atau kota, wilayah melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan modal sosial dapat digunakan sebagai alternatif solusi sebagai perekat sosial dalam upaya menyelesaikan konflik sosial. Berbeda dengan penelitian di atas, pada penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan yang membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Penelitian ini difokuskan pada permasalahan seputar konflik politik.
- 2) Dilihat dari segi sejarah Kota Malang sebagai tujuan pariwisata, maka hal-hal yang memicu permasalahan seputar konflik politik yang terjadi di Malang relatif beragam,
- 3) Masyarakat Malang merupakan masyarakat yang religius, lugas dan dinamis serta memiliki hubungan kekerabatan yang relatif baik.
- 4) Potensi konflik beragam, namun yang sempat muncul tidak sampai menimbulkan anarkisme yang berlebihan.

1.4 Tujuan Penelitian.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan pada fokus penelitian, antara lain :

- 1) Bagaimana pola konflik politik pada masyarakat Malang?
- 2) Bagaimana pola penyelesaian konflik politik pada masyarakat Malang?
- 3) Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan pada masyarakat Malang?
- 4) Modal sosial apa yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Malang?

1.5 Manfaat Penelitian.

Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik politik dalam suatu daerah.
- 2) Memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara konflik yang muncul dengan peran modal sosial.
- 3) Memberikan wawasan baru mengenai beberapa konflik yang ada di tengah masyarakat ; konflik sosial, konflik politik dan konflik etnis.
- 4) Memperkaya keilmuan di bidang psikologi dalam upaya pengembangan model penyelesaian konflik politik di masyarakat khususnya pada masyarakat Malang dan Jawa Timur dengan mendasarkan pada modal sosial yang ada sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Manfaat Praktis.

- 1) Memberikan pengetahuan bagi para pembaca (masyarakat) mengenai konflik-konflik politik yang sedang terjadi di kota Malang.
- 2) Memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang bagaimana akhirnya sebuah konflik yang muncul kemudian dapat terselesaikan.
- 3) Memberikan wawasan dan penjelasan tentang upaya penanggulangan konflik politik di kota Malang.
- 4) Meminimalisir tingkat konflik politik yang selama ini terjadi di kota Malang, sehingga makin tahun catatan kriminal yang terjadi di kota Malang semakin rendah.